



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5203, 5204, (021) 3440107, FAKSIMILE (021) 3846402
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 5341 /PB.1/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Sangat Segera
Hal : Rapat Koordinasi Persiapan Penelaahan RKA-KL Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2019

9 Juli 2018

Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJPb dan
2. Para Kepala KPPN
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan akan menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penelaahan RKA-KL Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2019.
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penelaahan RKA-KL satker instansi vertikal lingkup Ditjen Perbendaharaan TA 2019 akan diselenggarakan di Jakarta yang terbagi dalam 3 (tiga) batch dengan jadwal sebagai berikut:

Batch	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
Batch I	102	12-15 Juli 2018	KPPN Wilayah Kanwil DJPb Provinsi: Aceh (7), Sumut (12), Riau (3), Sumbar (6), Kepri (2), Jambi (5), Sumsel (5), Lampung (4), Bengkulu (4), Babel (2), Bali (3), Maluku (4), Papua Barat (3), Papua (7) dan Operator Seluruh Kanwil DJPb (34)
Batch II	56	15-18 Juli 2018	KPPN Wilayah Kanwil DJPb Provinsi: DKI Jakarta (8), Banten (3), Jabar (12), Jateng (15), DIY (3), Jatim (15)
Batch III	56	18-21 Juli 2018	KPPN Wilayah Kanwil DJPb Provinsi: Kalbar (6), Kalteng (4), Kalsel (5), Kaltara (3), Kaltim (3), NTB (4), NTT (6), Sulsel (9), Sulbar (2), Sulteng (4), Sultra (4), Sulut (4), Gorontalo (2).
Jumlah	214		

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk menugaskan pegawai pada unit Saudara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Operator Sakti Modul Penganggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
 - b. 1 (satu) orang Operator Sakti Modul Penganggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
4. Dalam rangka memperlancar kegiatan dimaksud, peserta diwajibkan membawa surat tugas serta perlengkapan berupa alat/data/dokumen sebagaimana terlampir dalam surat ini.
5. Surat tugas dan tiket perjalanan (pergi-pulang (PP) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan) agar disampaikan kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 Juli 2018 ke alamat email keuangan.pa@gmail.com.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA 'A' LANTAI II JALAN. TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH-23241
TELP.(0651) 31070 FAKS.(0651) 31094 SITUS: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh

Nomor : S- /WPB.01/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Prinsip Memenuhi Undangan

9 Juli 2018

Yth. Kepala KPPN Takengon
Kepala KPPN Lhokseumawe
di tempat

Sehubungan dengan surat Kepala KPPN Takengon Nomor S-458/WPB.01/KP.07/2018 tanggal 6 Juli 2018 hal Permohonan Izin Menghadiri Undangan Rekonsiliasi BPJS Kesehatan dan surat Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe Nomor 544/I-08/0718 tanggal 5 Juli 2018 hal Undangan, dengan ini kami memberikan izin kepada Saudara dan Pejabat terkait di Unit Saudara untuk memenuhi undangan tersebut.

Adapun dalam menghadiri kegiatan tersebut tetap memperhatikan kelancaran operasional pelayanan terhadap stakeholder.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Wilayah,

Ahmad Fahmi
NIP 196410201985031003

Tembusan:
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

6. Peserta diminta untuk menggunakan transportasi yang paling efisien, bagi peserta yang menggunakan transportasi udara, tidak diperkenankan menggunakan penerbangan dengan kelas ekonomi tertinggi kelas Y (*yankee*).
7. Biaya perjalanan dinas dan akomodasi peserta kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

Gedung Keuangan Negara A Lt. 2 Jin. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh-23241
Telepon (0651) 31070 Faksimile (0651) 31094 Website: www.aceh-djpbk.org

Nomor : S- WPB.01/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 satu) berkas
Hal : Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai
(LB2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Aceh

Februari 2018

Yth. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
u.p. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-22/PB/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pedoman Pelaporan Administrasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama ini disampaikan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LB2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh bulan **Februari 2018** sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Zaid Burhan Ibrahim
NIP 197203011997031001

Lampiran I Surat Sekretaris Ditjen
Nomor: S-534/PB.1/2018
Tanggal: 9 Juli 2018

**ALAT/DATA/DOKUMEN YANG WAJIB DIBAWA OLEH PESERTA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENELAAHAN RKA-KL
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TA 2019**

No	Alat/ Data/ Dokumen
1	Laptop dengan spesifikasi maksimal: <ul style="list-style-type: none">- Operating System Windows minimal Windows 7;- RAM yang direkomendasikan sebesar 4GB
2	Daftar Perhitungan Anggaran (DPA) hasil cetakan dari aplikasi SAKURA dalam bentuk pdf.
3	Laporan aset dari aplikasi SIMAK BMN dalam bentuk pdf.
4	Data dukung usulan belanja modal yang telah diusulkan melalui aplikasi SAKURA (TOR, RAB, Pricelist/harga penawaran, Analisis Tingkat Kerusakan, HSBGN, RAB yang telah disetujui oleh Dinas PU setempat) dalam bentuk pdf.
5	Surat Keputusan Penetapan Rumah Jabatan
6	Surat Keputusan Penetapan (Upah Minimum Regional (UMR) apabila UMR lebih tinggi dari honor PPNP yang telah ditetapkan di dalam SBM TA 2019.
7	Daftar rekapitulasi biaya transport/tiket dari: <ul style="list-style-type: none">- KPPN/Kanwil ke Ibukota Propinsi;- KPPN/Kanwil ke Kabupaten/KPPN (wilayah kerja masing-masing) sesuai format terlampir.